



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 156 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN KRATON  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kraton sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Kraton yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Kraton adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kraton untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Kraton yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Kraton adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Kraton serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

#### Pasal 2

Renja Kecamatan Kraton Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 3

Renja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Kecamatan Kraton dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Kraton tahun lalu.

#### Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Kraton Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN,
  - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
  - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
  - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
  - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Kecamatan Kraton Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renja Kecamatan Kraton Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Kecamatan Kraton dalam menyusun RKA Kecamatan Kraton.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 156

# RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

**KECAMATAN KRATON**

Jl. Stasiun No. 39 Telp. (0343) 428398

KRATON 67151

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 156 TAHUN 2023  
TANGGAL: 2 AGUSTUS 2023

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN KRATON  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

---

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdapat pada pasal 11 yang berkaitan tentang Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra Perubahan 2024 – 2026 Tahun 2023 dan Renja Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang dicita – citakan maka perlu dituangkan dalam suatu perencanaan di

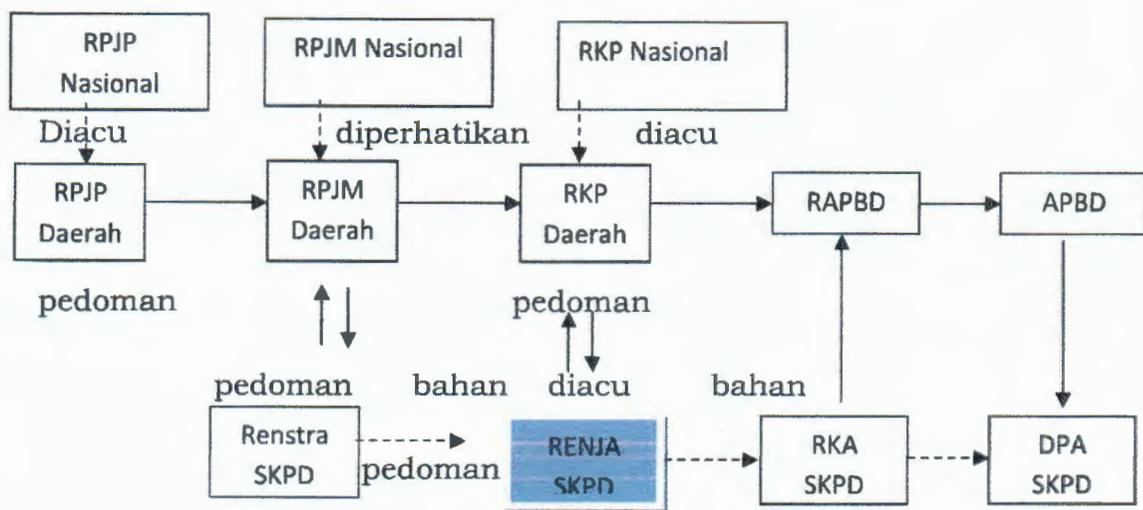
tingkat daerah dan perencanaan di tingkat perangkat daerah yang berupa rencana strategis perangkat daerah selama periode 5 (Lima) tahun dan rencana kerja perangkat daerah selama periode (satu) tahun Rencana kerja (Renja). Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

RENJA Perangkat Daerah tahun 2024 Kecamatan Kraton merupakan Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan Kepala Perangkat Daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas – tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepan dituntut untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kraton untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Kraton merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kraton sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Kraton untuk memasukkan program, kegiatan, dan Subkegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 ;

3. Renja Kecamatan Kraton merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan / Subkegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Kraton pada Tahun 2024 ini yang merupakan realisasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
4. Dalam Penyusunan Renja Kecamatan Kraton dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan, sehingga bisa diperoleh rencana kerja yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Penyusunan rancangan awal Renja Kecamatan Kraton merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Kraton yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Kraton mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Kraton dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perkembangan gerakan koperasi dan usaha mikro

Kecamatan Kraton, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kraton pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Kraton yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Kraton dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Kraton, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen rencana kerja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2019-2024 Provinsi Jawa Timur.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Kraton yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

---

Landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Kraton Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
- 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 3 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4 Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 14 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 15 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik/Bangkalan/Mojokerto/Surabaya/Sidoarjo/Lamongan, Kawasan Bromo/Tengger/Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
- 16 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan nasional
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan-perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
- 18 Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri keuangan, Menteri dalam negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor : 270/M.PPPN/11/2012, nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ , Nomor : SE-46/MPPPA/11/2011 Tentang strategi nasional (Stranas) Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG)
- 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodesifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 ;
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Pemerintah Daerah;

- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .....tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang dikeluarkan setiap tahunnya pada Bulan Juni)
- 25 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 ;
- 26 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019;
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005–2025 ;
- 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029 ;
- 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023 ;
- 30 Perda Nomor .... Tentang RPD Kab Pasuruan (menyusul) Perbup SOTK
- 31 Peraturan Bupati Pasuruan No.57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- 32 Surat Keputusan Bupati Pasuruan No.       Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Kraton tahun 2018 – 2023.
- 33 Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.
- 34 Perda Nomor 10 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahunn 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.
- 35 Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengarusutamaan gender Tahun 2022.
- 36 Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan perda Kabupaten Pasuruan Nomor 1 tentang Pengarus Tamaan Gender.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

---

Maksud disusunnya rencana kerja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD maupun RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kraton Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah pada Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah;
2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

## 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

---

Renja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Kraton, proses penyusunan Renja Kecamatan Kraton, keterkaitan antara Renja Kecamatan Kraton dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Kraton, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Kecamatan Kraton, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Kraton, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kraton Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Kraton;

Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Kraton.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kraton**

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan Kraton untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah**

Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana awal kegiatan – kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan usulan – usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

# **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

## **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kraton.

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kraton dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Kraton serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V : PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KRATON.**

Dalam sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan tahun (2022) dan perkiraan target tahun berjalan (2024). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan tahun-tahun sebelumnya.

Terkait dengan hal tersebut Renja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kraton melalui tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.A

## Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023 sampai dengan Tahun 2023

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Renstra s/d Tahun 2023	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%		
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	100%		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan kantor	100%		
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	100%		
Penyediaan Makanan dan Minuman	100%		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%		
Penyediaan Jasa Perkantoran	100%		
Penyediaan peralatan rumah tangga	100%		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100%		
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>100%</b>		
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%		
Pengadaan Peralatan Kantor	100%		
Pembangunan Gedung Kantor	100%		
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%		
Pengadaan Mebelair	100%		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	100%		
Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas/Operasional;	100%		
Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan kantor;	100%		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>100%</b>		
Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	100%		
Fasilitasi & Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100%		
Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	100%		
Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%		
<b>PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>100%</b>		
Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	100%		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		
Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	100%		

Penyusunan Lakip dan Laporan Keuangan	100%		
<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan</b>	<b>100%</b>		
Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	100%		
<b>Program Fasilitasi Kegiatan Kecamatan</b>	<b>100%</b>		
Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	100%		
<b>Program Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>		
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	100%		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100%</b>		
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	33%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17%		
<b>PROGRAM PEMBRDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100%</b>		
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100%</b>		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	76%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60%		
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KEYERTIBAN UMUM</b>	<b>100%</b>		
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32%		
Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80%		
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMRINTAHAN DESA</b>	<b>100%</b>		
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>		
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	60%		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32%		

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (TAHUN BERJALAN)  
KABUPATEN PASURUAN**

Tabel  
2.1

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (5+7+9=10)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10 / 4 = 11)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
X	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
<b>2019-2020</b>										
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan kantor</b>								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM & intrnet		12 bln						
				4 rekening						
	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		1 paket						
				1 set						
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya honorarium bagi		12 bln						



					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			1 paket					
					Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas/Operasional;	Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan		1 paket					
								1 paket					
					Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan kantor;	jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan		1 paket					
								1 paket					
					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>								
					Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan			2 Kegiatan					
					Fasilitasi & Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan			2 Kegiatan					
					Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan			0					
					Pendidikan dan Pelatihan Formal			0					
					<b>PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>Presentase Aspirasi Permintaan Pelayanan Yang Dapat Difasilitasi</b>							
					Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosial Masyarakat		5 Keg					
								12 kali					
					<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terlaksananya program fasilitasi kecamatan dengan baik</b>							
					Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan		5 Keg					
								12 kali					
					Penyusunan Lakip dan Laporan Keuangan	Laporan akhir tahun tepat waktu		1 keg					
					<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan</b>	<b>Persentase desa/kelurahan yang melaporkan administrasi tepat waktu dan sesuai ketentuan</b>							
					Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan		5 Keg					
					<b>Program Fasilitasi Kegiatan Kecamatan</b>	<b>Persentase aspirasi dan permintaan pelayanan yang dapat difasilitasi</b>							
					Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi kegiatan tingkat kecamatan		5 Keg					
					<b>Program Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase kasus kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan</b>							



X	XX	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X	XX	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140	23	23 Orang	23	100%	24	70	50%
						Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			14 bulan	14 bulan				
X	XX	01	2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150	12	12 Dokumen	3	40%	24	39	26%
						Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium PTT dan Upah THL			12 bulan	12 bulan				
X	XX	01	2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200	0	12 Dokumen	0	0%	80	80	40%
						Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium Jasa Administrasi Keuangan			12 bulan	12 bulan				
X	XX	01	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%

X	XX	01	2.1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	0	2 Paket	0	0%	1	1	20%
X	XX	01	2.1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	0	4 Orang	0	0%	10	10	20%
X	XX	01	2		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pemenuhan administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
						<b>Persentase tersedianya kebersihan umum kantor</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>				
X	XX	01	2.1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90	4	10 Paket	0	0%	5	9	10%
X	XX	01	2.1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	4	10 Paket	1	10%	1	6	12%
						<b>Jumlah jenis peralatan kebersihan, BHP kebersihan, alat elektronik yang dibeli</b>			<b>15 jenis</b>	<b>15 jenis</b>				
X	XX	01	2.1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	0	2 Paket	0	0%	1	1	20%

X	XX	01	2.1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	5	4 Dokumen	1	35%	1	7	35%
						Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang diadakan			4 jenis	4 jenis				
X	XX	01	2.1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16	0	12 dokumen	0	0%	5	5	31%
X	XX	01	2.1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	3	12 laporan	3	40%	12	18	60%
						Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi			16 laporan	16 laporan				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli			15 jenis	15 jenis				
X	XX	01	2		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang Milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
						<b>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>				
X	XX	01	2.1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	0	1 Unit	0	0%	1	1	33%
X	XX	01	2.1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	1	5 Paket	1	20%	100%	3	100%
X	XX	01	2.1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	0	4 Unit	0	0%	10	10	100%

						Jumlah Peralatan Kantor dan mesin lainnya yang dibeli			1 unit	1 unit								
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan			1 unit	1 unit								
X	XX	01	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran surat kabar, telpon, air dan internet selama 12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%								
X	XX	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	45	12	12 Laporan	3	40%	12	27	60%				
						Jumlah bulan pembayaran rekening telepon, air, dan internet				12 Bulan	12 Bulan							
X	XX	01	2.1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	6	10 Laporan	0	0%	3	9	60%				
X	XX	01	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah guna menunjang pemerintahan daerah				100%	100%							

X	XX	01	2.1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45	9	15 Unit	3	15%	14	26	58%
						Jumlah jenis kendaraan yang dipelihara				2 jenis	2 jenis			
X	XX	01	2.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	0	5 Unit	1	20%	10	11	44%
						Jumlah jenis peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara				2 jenis	2 jenis			
X	XX	01	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	1	1 Unit	0	0%	5	6	60%
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara				1 ls	1 ls			
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan</b>	90							
7	01				<b>KECAMATAN</b>	<b>Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas</b>	%	%	%	%	%	%	%	%
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang baik</b>	100%	50%	89%	0%	0%	100%	100%	100%

											100%	100%						
7	01	02	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	50%	100%	0%	0%	100%	100%	100%				
						Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				2 laporan	2 laporan							
7	01	02	2	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	2	1 Laporan	0	0%	2	4	33%				
						Jumlah laporan hasil forum				1 laporan	1 laporan							
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi				100%	100%							
7	01	02	2	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	0	4 Laporan	0	0%	2	2	17%				



7	01	04	2	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25	4	1 Laporan	0	0%	4	8	32%
						Jumlah laporan hasil kegiatan operasi gabungan				2 laporan	2 laporan			
7	01	04	2	02	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25	12	5 Laporan	2	45%	6	20	80%
						Jumlah Koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat				6 kali	6 kali			
7					<b>LINSUR KEWILAYAHAN</b>									
7	01				<b>KECAMATAN</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMRINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas terhadap Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pemenuhan Desa yang Mengerjakan Administrasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	25	0	25 Dokumen	0	0%	15	15	60%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25	3	25 Dokumen	0	0%	5	8	32%

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kraton sampai dengan triwulan keempat tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai

dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan;

- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kraton dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompetensi (reward and punishment), dan kesejahteraan pegawai;
  - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan

pemerintahan dengan optimal;

- d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi;
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Kraton dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah;
  3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
    - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
    - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

**2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KRATON**  
**Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

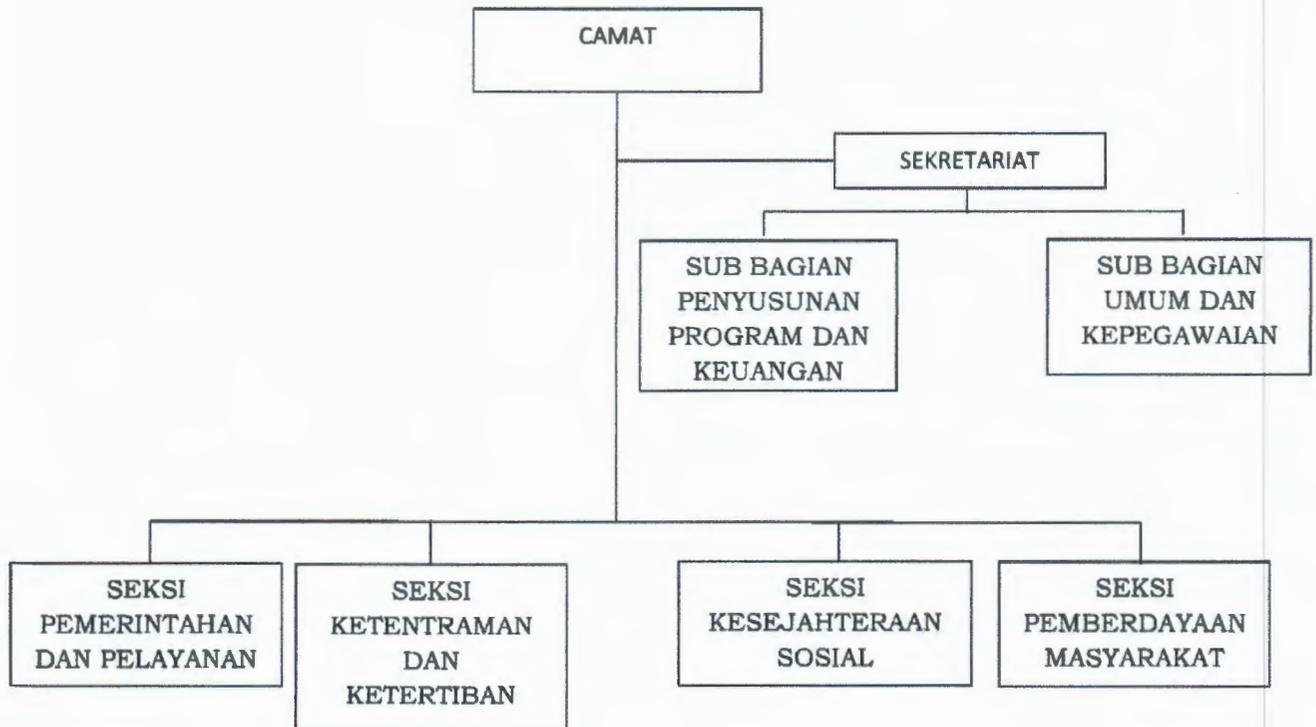
**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KRATON**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan

Nomor : 69 Tahun 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

**KECAMATAN**



Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah :

1. Unsur pimpinan yaitu Camat
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/sekretariat yang terdiri :
  - a. Sekretaris Camat
  - b. Subag Umum dan Kepegawaian
  - c. Subag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
  - b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Kantor Kecamatan Kraton.

Tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan penegakan peraturan Perundang – Undang;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
5. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang Lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atas Kelurahan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan

yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, dan proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayan masyarakat dalam hal ini OPD Kecamatan Kraton yang membantu Bupati Pasuruan dalam pelayanan masyarakat, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pada umumnya kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan;
2. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, dan Lembaga masyarakat tingkat desa;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi OPD Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas produk pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.

Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran Dalam mencapai kinerja pelayanan OPD Kecamatan Kraton tahun 2022, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu kinerja OPD Kecamatan Winongan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Kraton

**Tabel 2.2**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kraton  
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	IKU (Tujuan & Sasaran) P-Renstra 2018-2023											
<b>A</b>	<b>Indikator Tujuan</b>											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			87.50	88.00			90.46	88.94			
<b>B</b>	<b>Indikator Sasaran</b>											
1	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas			95%	100%			100%	100%			
2	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina			100%	100%			100%	100%			
3	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan			100%	100%			100%	100%			
4	Nilai SAKIP Kecamatan			70.00	73.00			72.50	74.00			
	IKU (Tujuan & Sasaran) Renstra 2024-2026											
<b>A</b>	<b>Indikator Tujuan</b>											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan					90	95	90.46	88.94	90	95	
<b>B</b>	<b>Indikator sasaran</b>											
1	Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan					100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					76.00	78.00	72.50	74.00	76.00	78.00	

### **2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kraton bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorporate Sosial Responsibility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka

- 5) penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja SKPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan Kraton sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja SKPD di tabel 2.3 terlampir

**Tabel 2.3**  
**REVIU RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024**  
**KABUPATEN PASAUURUAN**

**Perangkat Daerah : Kecamatan Kraton**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	NON URUSAN		Indeks Reformasi Birokrasi					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			
	KECAMATAN		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KRATON	Persentase Kebutuhan Urusan Pemerintahan Yang Terpenuhi	100%	3,341,060,900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KRATON	Persentase Kebutuhan Urusan Pemerintahan Yang Terpenuhi	100%	3,341,060,900	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN KRATON	Persentase pemenuhan dok SAKIP	100%	30,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN KRATON	Persentase pemenuhan dok SAKIP	100%	30,000,000	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN KRATON	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	10,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN KRATON	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	10,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	10,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	10,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	10,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN KRATON	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	2,750,238,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN KRATON	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	2,750,238,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN KRATON	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	228 org-bln	2,357,298,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN KRATON	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 org-bln	2,357,298,000

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN KRATON	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	156 org-bln	351,360,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN KRATON	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156 org-bln	351,360,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KECAMATAN KRATON	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelakupengadaan barang/jasa	84 org-bln	41,580,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KECAMATAN KRATON	jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84 org-bln	41,580,000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>Persentase pemenuhan adm BMD</b>	<b>100%</b>	<b>5,000,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Persentase pemenuhan adm BMD</b>	<b>100%</b>	<b>5,000,000</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	KECAMATAN KRATON	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	KECAMATAN KRATON	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5,000,000

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KECAMATAN KRATON	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KECAMATAN KRATON	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KECAMATAN KRATON	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	10,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KECAMATAN KRATON	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	10,000,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>persentase pemenuhan administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>146,221,760</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>persentase pemenuhan administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>146,221,760</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN KRATON	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	4,869,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN KRATON	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	4,869,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN KRATON	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 jenis	3,529,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN KRATON	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 jenis	3,529,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KECAMATAN KRATON	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KECAMATAN KRATON	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,000,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN KRATON	Jumlah bahan logistik Kantor	36 jenis	21,333,360	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN KRATON	Jumlah bahan logistik Kantor	36 jenis	21,333,360
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN KRATON	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	8 jenis	7,494,400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN KRATON	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	8 jenis	7,494,400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,600,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN KRATON	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	100 org	2,536,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN KRATON	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	100 org	2,536,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN KRATON	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah	12 laporan	91,860,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN KRATON	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah	12 laporan	91,860,000

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN KRATON	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN KRATON	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN KRATON	Persentase pengadaan barang Milik daerah	100%	132,907,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN KRATON	Persentase pengadaan barang Milik daerah	100%	132,907,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	45,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	45,000,000
Pengadaan Meubelair	KECAMATAN KRATON	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20,000,000	Pengadaan Meubelair	KECAMATAN KRATON	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN KRATON	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN KRATON	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000

	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	KECAMATAN KRATON	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	KECAMATAN KRATON	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN KRATON	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 unit	27,907,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN KRATON	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 unit	27,907,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN KRATON	Persentase pembayaran surat kabar, telpon, air dan internet selama 12 bulan	100%	78,455,840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN KRATON	Persentase pembayaran surat kabar, telpon, air dan internet selama 12 bulan	100%	78,455,840
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN KRATON	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	96 rek-bln	74,955,840	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN KRATON	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	96 rek-bln	74,955,840
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN KRATON	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 unit	3,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN KRATON	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 unit	3,500,000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	KECAMATAN KRATON	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	178,238,300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	KECAMATAN KRATON	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	178,238,300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional	14 unit	106,032,100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional	14 unit	106,032,100
Pemeliharaan Meubelair	KECAMATAN KRATON	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	10,000,000	Pemeliharaan Meubelair	KECAMATAN KRATON	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	10,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN KRATON	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN KRATON	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	10,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN KRATON	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	1 Paket	45,166,400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN KRATON	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	1 Paket	45,166,400

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN KRATON	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatagedung/kantor	3 jenis	7,039,800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN KRATON	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatagedung/kantor	3 jenis	7,039,800
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>90</b>		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan</b>	<b>90</b>	
<b>KECAMATAN</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>'Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Indeks</b>		<b>KECAMATAN</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>'Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan</b>	<b>Indeks</b>	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik</b>	<b>100%</b>	<b>63,486,000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik</b>	<b>100%</b>	<b>63,486,000</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>Persentase pemenuhan laporan Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>43,486,000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>Persentase pemenuhan laporan Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>43,486,000</b>

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	2 laporan	37,072,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN KRATON	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 laporan	37,072,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN KRATON	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 laporan	6,414,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39 laporan	6,414,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN	12 laporan	10,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN	12 laporan	10,000,000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	3 Jneis	10,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	3 Jneis	10,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KECAMATAN KRATON	Prosentase Realisasi PBB-P2	100%	10,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KECAMATAN KRATON	Prosentase Realisasi PBB-P2	100%	10,000,000

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Lpaoran	10,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Lpaoran	10,000,000
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
KECAMATAN	KECAMATAN KRATON	'Persentase Desa/Kelurahan yang Telah Dibina	%	KECAMATAN	KECAMATAN KRATON	'Persentase Desa/Kelurahan yang Telah Dibina	%		
PROGRAM PEMBRDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KRATON	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	100%	49,230,000	PROGRAM PEMBRDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KRATON	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	100%	49,230,000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN KRATON	Persentase pemenuhan laporan Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	100%	49,230,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN KRATON	Persentase pemenuhan laporan Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	100%	49,230,000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KECAMATAN KRATON	Jumlah Lembaga Kmasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	3,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KECAMATAN KRATON	Jumlah Lembaga Kmasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	3,000,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 laporan	46,230,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 laporan	46,230,000
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	KECAMATAN KRATON			
<b>KECAMATAN</b>		'Persentase Konflik yang Tertangani Diwilayah Kecamatan	%		<b>KECAMATAN</b>		'Persentase Konflik yang Tertangani Diwilayah Kecamatan	%	
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KEYERTIBAN UMUM</b>	KECAMATAN KRATON	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	100%	23,500,000	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KEYERTIBAN UMUM</b>		Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	100%	23,500,000
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	KECAMATAN KRATON	Rasio Jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	100%	13,500,000	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	KECAMATAN KRATON	Rasio Jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	100%	13,500,000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraanketentraman dan ketertiban umum	4 laporan	4,500,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraanketentraman dan ketertiban umum	4 laporan	4,500,000

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	8 laporan	9,000,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	8 laporan	9,000,000	
Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	KECAMATAN KRATON	Terwujudnya ketertiban dan keteraturan sosial	100%	10,000,000	Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	KECAMATAN KRATON	Terwujudnya ketertiban dan keteraturan sosial	100%	10,000,000	
Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	2 Laporan	10,000,000	Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	KECAMATAN KRATON	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	2 Laporan	10,000,000	
UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN KRATON				
KECAMATAN		'Persentase Konflik yang Tertangani Diwilayah Kecamatan	%		KECAMATAN		'Persentase Konflik yang Tertangani Diwilayah Kecamatan	%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KRATON	Prosentase konflik sosial yang tertangani sesuai dengan kewenangan	100%	10,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Prosentase konflik sosial yang tertangani sesuai dengan kewenangan	100%	10,000,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN KRATON	Jumlah Kegiatan Penangan	3 Laporan	10,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN KRATON	Jumlah Kegiatan Penangan	3 Laporan	10,000,000	

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	KECAMATAN KRATON	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 org	10,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	KECAMATAN KRATON	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 org	10,000,000	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
<b>KECAMATAN</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>%</b>		<b>KECAMATAN</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMRINTAHAN DESA</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	1. Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	30,131,914	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMRINTAHAN DESA</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	1. Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	30,131,914	
		2. Persentase Pemerintahan Desa yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Raperdes APBDes					2. Persentase Pemerintahan Desa yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Raperdes APBDes			
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>Persentase Pemenuhan Desa yang Mengerjakan Administrasi</b>	<b>100%</b>	<b>30,131,914</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>KECAMATAN KRATON</b>	<b>Persentase Pemenuhan Desa yang Mengerjakan Administrasi</b>	<b>100%</b>	<b>30,131,914</b>	

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	KECAMATAN KRATON	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	12 Dokumen	10,000,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	KECAMATAN KRATON	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	12 Dokumen	10,000,000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	KECAMATAN KRATON	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	10,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	KECAMATAN KRATON	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	10,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	KECAMATAN KRATON	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	10,131,914	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	KECAMATAN KRATON	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	10,131,914
<b>JUMLAH</b>				<b>3,517,408,814</b>	<b>JUMLAH</b>				<b>3,517,408,814</b>

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Kraton Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Kraton saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Kedepannya diharapkan SKPD Kecamatan Kraton mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kraton dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKKAN NASIONAL**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kraton guna menyelaraskan terhadap arah serta kebijakan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan ;
3. Pemberdayaan UKMK khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna ;
4. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi brand/citra komoditas daerah;
5. Peningkatan kemudahan perijinan usaha ;
6. Perbaikan kualitas jaringan jalan ;
7. Peningkatan kapasitas/supply listrik wilayah ;

8. Peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan) ;
9. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
10. Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya ;
11. Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mencapai tujuan Kecamatan Kraton, adapun strategi Kecamatan Kraton yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
3. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
5. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan ketertiban wilayah

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Kraton yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dengan tertib
2. Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan
3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
5. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan ketertiban wilayah

### **3.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kraton**

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu(apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Kecamatan Kraton menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

- Meningkatnya Pelayanan Publik

Adapun Tujuan diatas dapat diukur dengan indikator Tujuan sesuai IKU kecamatan Kraton yaitu Persentase capaian IKM kecamatan Kraton.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran Kecamatan Kraton yang ditetapkan sebagai berikut :

TUJUAN / SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	FORMULA / PENJELASAN
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan	Hasil Perhitungan IKM berdasarkan Aplikasi e-tamu
Sasaran 1 : Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	(Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program) x 100
Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat

Sedangkan Sasaran strategis Kecamatan Pasrepan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran strategis Kecamatan Pasrepan adalah Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerjanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah(SAKIP) Kecamatan.

**Tabel 3.2**

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah  
Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90.46	95.00	90.00
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	72,50	73,00	76,00
Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Hasil penyelenggaraan kecamatan	100%	100%	100%

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk Menunjang Visi dan Misi Bupati Pasuruan dan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan, Berikut Program/Kegiatan/Sub kegiatan Kecamatan Kraton Tahun 2024.

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode P-Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKP2 Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKP2 Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP2 yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP2 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP2 Tahun 2022 s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		NON URUSAN		Meningkatnya Kualitas SAKIP																
		KECAMATAN		Nilai SAKIP Kecamatan	73			73												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	3,312,411,957	100%	3,067,425,516	100%	3,987,950,248	100%	3,312,411,957	100%	8306%	200%	6,379,837,473	200%	193%	Camat Kraton	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	3,371,710	100%	0	100%	20,000,000	100%	3,371,710	100%	17%	200%	3,371,710	200%	100%	Camat Kraton	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	2,631,710	5	0	20	15,000,000	20	2,631,710	100%	18%	25	2,631,710	125%	100%	Camat Kraton	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	740,000	7	0	2	5,000,000	2	740,000	100%	15%	9	740,000	450%	100%	Camat Kraton	

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	2,775,101,767	100%	2,837,577,629	100%	3,528,639,890	100%	2,775,101,767	100%	79%	200%	5,612,679,396	200%	202%	Camat Kraton
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2300%	2,469,884,023	19	2,495,994,885	2300%	3,180,317,890	23	2,469,884,023	100%	78%	42	4,965,878,908	183%	201%	Camat Kraton
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	270,897,744	11	306,537,744	20	308,040,000	20	270,897,744	100%	88%	31	577,435,488	155%	213%	Camat Kraton
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10	34,320,000	4	35,045,000	10	40,282,000	10	34,320,000	100%	85%	14	69,365,000	140%	202%	Camat Kraton
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin	100%	16,238,180	0%	0	100%	26,450,000	100%	16,238,180	100%	61%	100%	16,238,180	100%	100%	Camat Kraton
				Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	15,138,180	0	0	1	21,450,000	1	15,138,180	100%	71%	1	15,138,180	100%	100%	Camat Kraton
				Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	1,100,000	0	0	7	5,000,000	7	1,100,000	100%	22%	7	1,100,000	100%	100%	Camat Kraton
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pemenuhan administrasi Umum	100%	106,995,940	100%	83,446,000	100%	72,600,203	100%	106,995,940	100%	147%	200%	190,441,940	200%	178%	Camat Kraton
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10,736,850	10	3,825,000	1	3,113,880	1	10,736,850	100%	345%	11	14,561,850	1100%	136%	Camat Kraton
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	25,580,750	10	26,367,000	1	15,735,913	1	25,580,750	100%	163%	11	51,947,750	1100%	203%	Camat Kraton
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	3,654,340	0	0	1	8,888,000	1	3,654,340	100%	41%	1	3,654,340	100%	100%	Camat Kraton
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	5,000,000	4	5,869,000	2	5,000,000	2	5,000,000	100%	100%	6	10,969,000	300%	219%	Camat Kraton
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1,560,000	0	0	1	5,000,000	1	1,560,000	100%	31%	1	1,560,000	100%	100%	Camat Kraton

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	60,464,000	12	47,285,000	10	34,862,410	10	60,464,000	100 %	173%	22	107,749,000	220%	178 %	Camat Kraton
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang Milik daerah	100%	197,531,160	0%	0	100%	142,220,950	100 %	197,531,160	100 %	139%	100 %	197,531,160	100%	100 %	Camat Kraton
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	28,281,690	0	0	100%	25,000,000	1	28,281,690	100 %	113%	1	28,281,690	100%	100 %	Camat Kraton
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	103,586,310	0	0	1	64,720,950	1	103,586,310	100 %	160%	1	103,586,310	100%	100 %	Camat Kraton
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	65,663,160	0	0	5	52,500,000	5	65,663,160	100 %	125%	5	65,663,160	100%	100 %	Camat Kraton
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran surat kabar, telepon, air dan internet selama 12 bulan	100%	71,106,500	100 %	64,551,887	100%	91,059,205	100 %	71,106,500	100 %	78%	200 %	135,658,387	200%	191 %	Camat Kraton
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	67,806,500	12	64,551,887	12	69,659,205	12	67,806,500	100 %	97%	24	132,358,387	200%	195 %	Camat Kraton
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	3,300,000	0	0	1	21,400,000	1	3,300,000	100 %	15%	1	3,300,000	100%	100 %	Camat Kraton
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	142,066,700	100 %	81,850,000	100%	106,980,000	100 %	142,066,700	100 %	133%	200 %	223,916,700	200%	158 %	Camat Kraton
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13	101,366,000	15	71,965,000	13	71,230,000	13	101,366,000	100 %	142%	28	173,331,000	215%	171 %	Camat Kraton
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	17,701,500	5	9,885,000	25	20,100,000	25	17,701,500	100 %	88%	30	27,586,500	120%	156 %	Camat Kraton

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	22,999,200	0		10	15,650,000	10	22,999,200	100%	147%	10	22,999,200	100%	100%	Camat Kraton
					90				90		90		100%						
					%				%		%								
				Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	100%	15,339,000	100%	7,218,000	100%	15,000,000	100%	15,339,000	100%	102%	200%	22,218,000	200%	145%	Camat Kraton
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan laporan Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	100%	15,339,000	100%	7,218,000	100%	15,000,000	100%	15,339,000	100%	102%	200%	22,557,000	200%	147%	Camat Kraton
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	11,639,000	1	7,218,000	12	10,000,000	12	11,639,000	100%	116%	13	18,857,000	108%	162%	Camat Kraton
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	3,700,000	0	0	12	5,000,000	12	3,700,000	100%	74%	12	3,700,000	100%	100%	Camat Kraton
					%				%		%								
				Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	100%	33,862,200	100%	64,202,000	100%	29,930,120	100%	33,862,200	100%	113%	200%	98,064,200	200%	290%	Camat Kraton
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemenuhan laporan Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	100%	33,862,200	100%	64,202,000	100%	29,930,120	100%	33,862,200	100%	113%	200%	98,064,200	200%	290%	Camat Kraton
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25	22,619,200	7	21,657,500	25	21,218,120	25	22,619,200	100%	107%	32	44,276,700	128%	195%	Camat Kraton

			Pembangunan di Desa																		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25	11,243,000	12	42,544,500	25	8,712,000	25	11,243,000	100 %	129%	37	53,787,500	148%	478 %	Camat Kraton		
					%			%		%											
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KEYERTIBAN UMUM</b>		Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	100%	61,096,900	100 %	20,347,000	100%	46131340	100 %	61096900	100 %	132%	200 %	81,443,900	200%	133 %	Camat Kraton		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rasio Jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	100%	61,096,900	100 %	20,347,000	100%	46,131,340	100 %	61,096,900	100 %	132%	200 %	81,443,900	200%	133 %	Camat Kraton		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25	29,418,400	12	6,600,000	25	29,015,140	25	29,418,400	100 %	101%	37	36,018,400	148%	122 %	Camat Kraton		
			Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	31,678,500	5	13,747,000	12	17,116,200	12	31,678,500	100 %	185%	17	45,425,500	142%	143 %	Camat Kraton		
					%			%		%											
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMRINTAHAN DESA</b>		Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	100%	12,239,250	100 %	9,257,000	100%	21500150	100 %	12,239,250	100 %	57%	200 %	21,496,250	200%	176 %	Camat Kraton		

			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pemenuhan Desa yang Mengerjakan Administrasi	100%	12,239,250	100 %	9,257,000	100%	21,500,150	100 %	12,239,250	100 %	57%	200 %	21,496,250	200%	176 %	Camat Kraton	
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	25	4,345,750	0	0	25	6,058,250	25	4,345,750	100 %	72%	25	4,345,750	100%	100 %	Camat Kraton		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25	7,893,500	5	9,257,000	25	15,441,900	25	7,893,500	100 %	51%	30	17,150,500	120%	217 %	Camat Kraton		

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD KECAMATAN PASREPAN**

### **4.1 Program dan Kegiatan**

Program Merupakan Kumpulan Kegiatan Yang Menggambarkan Tindakan-Tindakan Yang Akan Dilakukan Untuk Menjalankan Misi Yang Diemban Oleh Suatu Organisasi. Adapun Kegiatan Merupakan Suatu Tindakan Dari Penjabaran Program Untuk Mencapai Tujuan Tertentu Sesuai Dengan Kebijakan Yang Telah Digariskan. Berpedoman Pada Tahun Sebelumnya Maka Program-Program Serta Kegiatan-Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2024 Adalah Sebagai Berikut :

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah terdiri dari :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari :
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari :
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya ;
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari :
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu ;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
    - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
    - Pengadaan Meubelair ;
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
  7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari :
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari :
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
    - Pemeliharaan Meubelair ;
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ;
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
- 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terdiri dari :**
    - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
    - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
  - 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan :**
    - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
  - 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
    - Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
- 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari :**
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

**1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari :**

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan ;
- Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

**2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada terdiri dari :**

- Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

**VI. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa.

Adapun Implementasi Rencana Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Sebagaimana Pada Table 3.1 (Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan OPD / Kecamatan Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat di table 3.1

**Tabel 4 (T-C.33)**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kabupaten Pasuruan**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Krataon

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	NON URUSAN	Meningkatnya Kualitas SAKIP	Kecamatan Kraton	73.00					
X	XX	KECAMATAN	Kecamatan Kraton						
X	XX 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kraton	100%	3,335,060,900	DAU		100%	3,559,666,900
X	XX 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kraton	100%	Rp 30,000,000	DAU		100%	33,000,000
X	XX 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kraton	1 Dokumen	Rp 10,000,000	DAU		1 Dokumen	11,000,000
					Belanja operasi : Rp 10,000,000				11,000,000
					Belanja pegawai : Rp -				-
					Belanja barang dan jasa : Rp 10,000,000				11,000,000
					Belanja bunga : Rp -				-
					Belanja subsidi : Rp -				-
					Belanja hibah : Rp -				-
					Belanja bantuan sosial : Rp -				-
					Belanja modal : Rp -				-
					Belanja tidak terduga : Rp -				-
					Belanja transfer : Rp -				-
X	XX 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kraton	1 Laporan	Rp 10,000,000	DAU		1 Laporan	11,000,000
					Belanja operasi : Rp 10,000,000				11,000,000
					Belanja pegawai : Rp -				-
					Belanja barang dan jasa : Rp 10,000,000				11,000,000
					Belanja bunga : Rp -				-
					Belanja subsidi : Rp -				-
					Belanja hibah : Rp -				-
					Belanja bantuan sosial : Rp -				-
					Belanja modal : Rp -				-
					Belanja tidak terduga : Rp -				-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Belanja transfer	: Rp	-			-
X	XX	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kraton	1 Laporan		Rp 10,000,000	DAU	1 Laporan	11,000,000
								Belanja operasi	: Rp	10,000,000			11,000,000
								Belanja pegawai	: Rp	-			-
								Belanja barang dan jasa	: Rp	10,000,000			11,000,000
								Belanja bunga	: Rp	-			-
								Belanja subsidi	: Rp	-			-
								Belanja hibah	: Rp	-			-
								Belanja bantuan sosial	: Rp	-			-
								Belanja modal	: Rp	-			-
								Belanja tidak terduga	: Rp	-			-
								Belanja transfer	: Rp	-			-
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kecamatan Kraton	100%		Rp 2,750,238,000	DAU	100%	3,025,261,800
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kraton	228 org-bln		Rp 2,357,298,000	DAU	228 org-bln	2,593,027,800
								Belanja operasi	: Rp	2,357,298,000			2,593,027,800
								Belanja pegawai	: Rp	2,357,298,000			2,593,027,800
								Belanja barang dan jasa	: Rp	-			-
								Belanja bunga	: Rp	-			-
								Belanja subsidi	: Rp	-			-
								Belanja hibah	: Rp	-			-
								Belanja bantuan sosial	: Rp	-			-
								Belanja modal	: Rp	-			-
								Belanja tidak terduga	: Rp	-			-
								Belanja transfer	: Rp	-			-
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Kraton	156 org-bln		Rp 351,360,000	DAU	156 org-bln	386,496,000
								Belanja operasi	: Rp	351,360,000			386,496,000
								Belanja pegawai	: Rp	-			-
								Belanja barang dan jasa	: Rp	351,360,000			386,496,000
								Belanja bunga	: Rp	-			-
								Belanja subsidi	: Rp	-			-
								Belanja hibah	: Rp	-			-
								Belanja bantuan sosial	: Rp	-			-
								Belanja modal	: Rp	-			-
								Belanja tidak terduga	: Rp	-			-
								Belanja transfer	: Rp	-			-
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kraton	84 org-bln		Rp 41,580,000	DAU	84 org-bln	45,738,000
								Belanja operasi	: Rp	41,580,000			45,738,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Belanja barang dan jasa : Rp	5,000,000			5,500,000	
								Belanja bunga : Rp	-			-	
								Belanja subsidi : Rp	-			-	
								Belanja hibah : Rp	-			-	
								Belanja bantuan sosial : Rp	-			-	
								Belanja modal : Rp	-			-	
								Belanja tidak terduga : Rp	-			-	
								Belanja transfer : Rp	-			-	
X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Kraton	2 Orang	Rp	10,000,000	DAU	2 Orang	11,000,000
								Belanja operasi : Rp	10,000,000			11,000,000	
								Belanja pegawai : Rp	-			-	
								Belanja barang dan jasa : Rp	10,000,000			11,000,000	
								Belanja bunga : Rp	-			-	
								Belanja subsidi : Rp	-			-	
								Belanja hibah : Rp	-			-	
								Belanja bantuan sosial : Rp	-			-	
								Belanja modal : Rp	-			-	
								Belanja tidak terduga : Rp	-			-	
								Belanja transfer : Rp	-			-	
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi Umum	Kecamatan Kraton	100%	Rp	146,231,760	DAU	100%	160,843,936
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kraton	1 Paket	Rp	4,869,000	DAU	1 Paket	5,355,900
								Belanja operasi : Rp	4,869,000			5,355,900	
								Belanja pegawai : Rp	-			-	
								Belanja barang dan jasa : Rp	4,869,000			5,355,900	
								Belanja bunga : Rp	-			-	
								Belanja subsidi : Rp	-			-	
								Belanja hibah : Rp	-			-	
								Belanja bantuan sosial : Rp	-			-	
								Belanja modal : Rp	-			-	
								Belanja tidak terduga : Rp	-			-	
								Belanja transfer : Rp	-			-	
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kraton	1 Paket	Rp	3,529,000	DAU	1 Paket	3,881,900
								Belanja operasi : Rp	3,529,000			3,881,900	
								Belanja pegawai : Rp	-			-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Belanja barang dan jasa : Rp	3,529,000			3,881,900	
								Belanja bunga : Rp	-			-	
								Belanja subsidi : Rp	-			-	
								Belanja hibah : Rp	-			-	
								Belanja bantuan sosial : Rp	-			-	
								Belanja modal : Rp	-			-	
								Belanja tidak terduga : Rp	-			-	
								Belanja transfer : Rp	-			-	
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Kraton	1 Paket	Rp	1,000,000	DAU	1 Paket	1,100,000
								Belanja operasi : Rp	1,000,000				1,100,000
								Belanja pegawai : Rp	-				-
								Belanja barang dan jasa : Rp	1,000,000				1,100,000
								Belanja bunga : Rp	-				-
								Belanja subsidi : Rp	-				-
								Belanja hibah : Rp	-				-
								Belanja bantuan sosial : Rp	-				-
								Belanja modal : Rp	-				-
								Belanja tidak terduga : Rp	-				-
								Belanja transfer : Rp	-				-
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	Kecamatan Kraton	36 Jenis	Rp	21,333,360	DAU	36 Jenis	23,466,696
								Belanja operasi : Rp	21,333,360				23,466,696
								Belanja pegawai : Rp	-				-
								Belanja barang dan jasa : Rp	21,333,360				23,466,696
								Belanja bunga : Rp	-				-
								Belanja subsidi : Rp	-				-
								Belanja hibah : Rp	-				-
								Belanja bantuan sosial : Rp	-				-
								Belanja modal : Rp	-				-
								Belanja tidak terduga : Rp	-				-
								Belanja transfer : Rp	-				-
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Kraton	8 Jenis	Rp	7,494,400	DAU	8 Jenis	8,243,840
								Belanja operasi : Rp	7,494,400				8,243,840
								Belanja pegawai : Rp	-				-
								Belanja barang dan jasa : Rp	7,494,400				8,243,840
								Belanja bunga : Rp	-				-
								Belanja subsidi : Rp	-				-
								Belanja hibah : Rp	-				-
								Belanja bantuan sosial : Rp	-				-
								Belanja modal : Rp	-				-
								Belanja tidak terduga : Rp	-				-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
									Belanja transfer	: Rp	-			-	
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Kraton	1 Dokumen		Rp	3,600,000	DAU	1 Dokumen		3,960,000
									Belanja operasi	: Rp	3,600,000			3,960,000	
									Belanja pegawai	: Rp	-			-	
									Belanja barang dan jasa	: Rp	3,600,000			3,960,000	
									Belanja bunga	: Rp	-			-	
									Belanja subsidi	: Rp	-			-	
									Belanja hibah	: Rp	-			-	
									Belanja bantuan sosial	: Rp	-			-	
									Belanja modal	: Rp	-			-	
									Belanja tidak terduga	: Rp	-			-	
									Belanja transfer	: Rp	-			-	
X	XX	01	2.06	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	Kecamatan Kraton	100 Orang		Rp	2,536,000	DAU	100 Orang		2,789,600
									Belanja operasi	: Rp	2,536,000			2,789,600	
									Belanja pegawai	: Rp	-			-	
									Belanja barang dan jasa	: Rp	2,536,000			2,789,600	
									Belanja bunga	: Rp	-			-	
									Belanja subsidi	: Rp	-			-	
									Belanja hibah	: Rp	-			-	
									Belanja bantuan sosial	: Rp	-			-	
									Belanja modal	: Rp	-			-	
									Belanja tidak terduga	: Rp	-			-	
									Belanja transfer	: Rp	-			-	
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kraton	12 Laporan		Rp	91,860,000	DAU	12 Laporan		101,046,000
									Belanja operasi	: Rp	91,860,000			101,046,000	
									Belanja pegawai	: Rp	-			-	
									Belanja barang dan jasa	: Rp	91,860,000			101,046,000	
									Belanja bunga	: Rp	-			-	
									Belanja subsidi	: Rp	-			-	
									Belanja hibah	: Rp	-			-	
									Belanja bantuan sosial	: Rp	-			-	
									Belanja modal	: Rp	-			-	
									Belanja tidak terduga	: Rp	-			-	
									Belanja transfer	: Rp	-			-	
X	XX	01	2.06	09	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Kraton	1 Dokumen		Rp	10,000,000	DAU	1 Dokumen		11,000,000
									Belanja operasi	: Rp	10,000,000			11,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
						Belanja subsidi : Rp	-		-				
						Belanja hibah : Rp	-		-				
						Belanja bantuan sosial : Rp	-		-				
						Belanja modal : Rp	-		-				
						Belanja tidak terduga : Rp	-		-				
						Belanja transfer : Rp	-		-				
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Kraton	1 Unit	Rp 20,000,000	DAU		1 Unit	22,000,000
									Belanja operasi : Rp 20,000,000				22,000,000
									Belanja pegawai : Rp				-
									Belanja barang dan jasa : Rp 20,000,000				22,000,000
									Belanja bunga : Rp				-
									Belanja subsidi : Rp				-
									Belanja hibah : Rp				-
									Belanja bantuan sosial : Rp				-
									Belanja modal : Rp				-
									Belanja tidak terduga : Rp				-
									Belanja transfer : Rp				-
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Kraton	4 Unit	Rp 27,907,000	DAU		4 Unit	30,697,700
									Belanja operasi : Rp 27,907,000				30,697,700
									Belanja pegawai : Rp				-
									Belanja barang dan jasa : Rp 27,907,000				30,697,700
									Belanja bunga : Rp				-
									Belanja subsidi : Rp				-
									Belanja hibah : Rp				-
									Belanja bantuan sosial : Rp				-
									Belanja modal : Rp				-
									Belanja tidak terduga : Rp				-
									Belanja transfer : Rp				-
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran surat kabar, telpon, air dan internet selama 12 bulan	Kecamatan Kraton	100%	Rp 78,455,840	DAU		100%	86,301,424
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kraton	96 rek-bln	Rp 74,955,840	DAU		96 rek-bln	82,451,424
									Belanja operasi : Rp 74,955,840				82,451,424
									Belanja pegawai : Rp				-
									Belanja barang dan jasa : Rp 74,955,840				82,451,424
									Belanja bunga : Rp				-
									Belanja subsidi : Rp				-
									Belanja hibah : Rp				-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Belanja bantuan sosial : Rp	-			-	
								Belanja modal : Rp	-			-	
								Belanja tidak terduga : Rp	-			-	
								Belanja transfer : Rp	-			-	
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kraton	1 Laporan	Rp 3,500,000	DAU		1 Laporan	3,850,000
								Belanja operasi : Rp	3,500,000				3,850,000
								Belanja pegawai : Rp	-				-
								Belanja barang dan jasa : Rp	3,500,000				3,850,000
								Belanja bunga : Rp	-				-
								Belanja subsidi : Rp	-				-
								Belanja hibah : Rp	-				-
								Belanja bantuan sosial : Rp	-				-
								Belanja modal : Rp	-				-
								Belanja tidak terduga : Rp	-				-
								Belanja transfer : Rp	-				-
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Kraton	100%	Rp 178,238,300	DAU		100%	196,062,130
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Kraton	13 Unit	Rp 106,032,100	DAU		13 Unit	116,635,310
								Belanja operasi : Rp	106,032,100				116,635,310
								Belanja pegawai : Rp	-				-
								Belanja barang dan jasa : Rp	106,032,100				116,635,310
								Belanja bunga : Rp	-				-
								Belanja subsidi : Rp	-				-
								Belanja hibah : Rp	-				-
								Belanja bantuan sosial : Rp	-				-
								Belanja modal : Rp	-				-
								Belanja tidak terduga : Rp	-				-
								Belanja transfer : Rp	-				-
X	XX	01	2.09	01	Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kecamatan Kraton	5 Unit	Rp 10,000,000	DAU		5 Unit	11,000,000
								Belanja operasi : Rp	10,000,000				11,000,000
								Belanja pegawai : Rp	-				-
								Belanja barang dan jasa : Rp	10,000,000				11,000,000
								Belanja bunga : Rp	-				-
								Belanja subsidi : Rp	-				-
								Belanja hibah : Rp	-				-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Belanja bantuan sosial : Rp	-			-	
								Belanja modal : Rp	-			-	
								Belanja tidak terduga : Rp	-			-	
								Belanja transfer : Rp	-			-	
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kraton	5 Unit	Rp	10,000,000	DAU	5 Unit	11,000,000
								Belanja operasi : Rp	10,000,000				11,000,000
								Belanja pegawai : Rp	-				-
								Belanja barang dan jasa : Rp	10,000,000				11,000,000
								Belanja bunga : Rp	-				-
								Belanja subsidi : Rp	-				-
								Belanja hibah : Rp	-				-
								Belanja bantuan sosial : Rp	-				-
								Belanja modal : Rp	-				-
								Belanja tidak terduga : Rp	-				-
								Belanja transfer : Rp	-				-
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	Kecamatan Kraton	1 Paket	Rp	45,166,400	DAU	1 Paket	49,683,040
								Belanja operasi : Rp	45,166,400				49,683,040
								Belanja pegawai : Rp	-				-
								Belanja barang dan jasa : Rp	45,166,400				49,683,040
								Belanja bunga : Rp	-				-
								Belanja subsidi : Rp	-				-
								Belanja hibah : Rp	-				-
								Belanja bantuan sosial : Rp	-				-
								Belanja modal : Rp	-				-
								Belanja tidak terduga : Rp	-				-
								Belanja transfer : Rp	-				-
X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kraton	1 Jenis	Rp	7,039,800	DAU	1 Jenis	7,743,780
								Belanja operasi : Rp	7,039,800				7,743,780
								Belanja pegawai : Rp	-				-
								Belanja barang dan jasa : Rp	7,039,800				7,743,780
								Belanja bunga : Rp	-				-
								Belanja subsidi : Rp	-				-
								Belanja hibah : Rp	-				-
								Belanja bantuan sosial : Rp	-				-
								Belanja modal : Rp	-				-
								Belanja tidak terduga : Rp	-				-
								Belanja transfer : Rp	-				-



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
					Belanja transfer : Rp	-			-				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN	Kecamatan Kraton	12 Laporan		10,000,000	DAU	12 Laporan	11,000,000				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Kecamatan Kraton	12 Laporan	Rp 10,000,000	DAU	12 Laporan	11,000,000	
									Belanja operasi : Rp 10,000,000			11,000,000	
									Belanja pegawai : Rp -			-	
									Belanja barang dan : Rp 10,000,000			11,000,000	
									Belanja bunga : Rp -			-	
									Belanja subsidi : Rp -			-	
									Belanja hibah : Rp -			-	
									Belanja bantuan : Rp -			-	
									Belanja modal : Rp -			-	
									Belanja tidak terduga : Rp -			-	
									Belanja transfer : Rp -			-	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Realisasi PBB-P2	Kecamatan Kraton	100%		10,000,000		11,000,000	
7	01	02	2.01	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintan yang terkait dgn Kewenangan Lain	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Kraton	12 Laporan	Rp 10,000,000	DAU	12 Laporan	11,000,000	
									Belanja operasi : Rp 10,000,000			11,000,000	
									Belanja pegawai : Rp -			-	
									Belanja barang dan : Rp 10,000,000			11,000,000	
									Belanja bunga : Rp -			-	
									Belanja subsidi : Rp -			-	
									Belanja hibah : Rp -			-	
									Belanja bantuan : Rp -			-	
									Belanja modal : Rp -			-	
									Belanja tidak terduga : Rp -			-	
									Belanja transfer : Rp -			-	
7					Unsur Kewilayahan								
7	01				Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Telah Dibina	Kecamatan Kraton	%					
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	Kecamatan Kraton	100%		49,230,000		100%	54,153,000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemenuhan laporan Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Kraton	100%		49,230,000	DAU	100%	54,153,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kraton	5 Lembaga	Rp 3,000,000	DAU		5 Lembaga	3,300,000
									Belanja operasi : Rp 3,000,000				3,300,000
									Belanja pegawai : Rp -				-
									Belanja barang dan : Rp 3,000,000				3,300,000
									Belanja bunga : Rp -				-
									Belanja subsidi : Rp -				-
									Belanja hibah : Rp -				-
									Belanja bantuan : Rp -				-
									Belanja modal : Rp -				-
									Belanja tidak terduga : Rp -				-
									Belanja transfer : Rp -				-
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kraton	25 Laporan	Rp 46,230,000	DAU		25 Laporan	50,853,000
									Belanja operasi : Rp 46,230,000				50,853,000
									Belanja pegawai : Rp -				-
									Belanja barang dan : Rp 46,230,000				50,853,000
									Belanja bunga : Rp -				-
									Belanja subsidi : Rp -				-
									Belanja hibah : Rp -				-
									Belanja bantuan : Rp -				-
									Belanja modal : Rp -				-
									Belanja tidak terduga : Rp -				-
									Belanja transfer : Rp -				-
7					<b>Unsur Kewilayahan</b>								
7	01				<b>Kecamatan</b>	<b>Persentase Konflik yang Tertangani Diwilayah Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Kraton</b>	<b>%</b>					
7	01	04			<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas</b>	<b>Kecamatan Kraton</b>	<b>100%</b>	<b>23,500,000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>25,850,000</b>
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Rasio Jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Kraton</b>	<b>100%</b>	<b>13,500,000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>14,850,000</b>
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kraton	4 Laporan	Rp 4,500,000	DAU		4 Laporan	4,950,000
									Belanja operasi : Rp 4,500,000				4,950,000
									Belanja pegawai : Rp -				-
									Belanja barang dan : Rp 4,500,000				4,950,000
									Belanja bunga : Rp -				-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Belanja subsidi : Rp	-			-	
								Belanja hibah : Rp	-			-	
								Belanja bantuan : Rp	-			-	
								Belanja modal : Rp	-			-	
								Belanja tidak terduga : Rp	-			-	
								Belanja transfer : Rp	-			-	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kraton	8 Laporan	Rp	9,000,000	DAU	8 Laporan	9,900,000
								Belanja operasi : Rp	9,000,000				9,900,000
								Belanja pegawai : Rp	-				-
								Belanja barang dan : Rp	9,000,000				9,900,000
								Belanja bunga : Rp	-				-
								Belanja subsidi : Rp	-				-
								Belanja hibah : Rp	-				-
								Belanja bantuan : Rp	-				-
								Belanja modal : Rp	-				-
								Belanja tidak terduga : Rp	-				-
								Belanja transfer : Rp	-				-
					<b>Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>Terwujudnya ketertiban dan ketertaturan sosial</b>	<b>Kecamatan Kraton</b>	<b>100%</b>		<b>10,000,000</b>			<b>11,000,000</b>
7	01	04	2.01	01	Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Kecamatan Kraton	2 Laporan	Rp	10,000,000	DAU	2 Laporan	11,000,000
								Belanja operasi : Rp	10,000,000				11,000,000
								Belanja pegawai : Rp	-				-
								Belanja barang dan : Rp	10,000,000				11,000,000
								Belanja bunga : Rp	-				-
								Belanja subsidi : Rp	-				-
								Belanja hibah : Rp	-				-
								Belanja bantuan : Rp	-				-
								Belanja modal : Rp	-				-
								Belanja tidak terduga : Rp	-				-
								Belanja transfer : Rp	-				-
7					<b>Unsur Kewilayahan</b>								
7	01				<b>Kecamatan</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan Kraton</b>	<b>%</b>					
7	01	06			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase konflik sosial yang tertangani sesuai dengan kewenangan</b>	<b>Kecamatan Kraton</b>	<b>100%</b>		<b>10,000,000</b>	<b>DAU</b>	<b>1</b>	<b>11,000,000</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	06	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penangan</b>	Kecamatan Kraton	100%	10.000,000	DAU		100%	11.000,000
7	01	04	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Kecamatan Kraton	2 Laporan	Rp 10,000,000	DAU		2 Laporan	11,000,000
									Belanja operasi : Rp 10,000,000				11,000,000
									Belanja pegawai : Rp -				-
									Belanja barang dan : Rp 10,000,000				11,000,000
									Belanja bunga : Rp -				-
									Belanja subsidi : Rp -				-
									Belanja hibah : Rp -				-
									Belanja bantuan : Rp -				-
									Belanja modal : Rp -				-
									Belanja tidak terduga : Rp -				-
									Belanja transfer : Rp -				-
7					<b>Unsur Kewilayahan</b>								
7	01				<b>Kecamatan</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Kraton	%					
7	01	06			<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas terhadap Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Kraton	100%	20,131,914	DAU		1	22,145,105
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pemenuhan Desa yang Mengerjakan Administrasi</b>	Kecamatan Kraton	100%	20,131,914	DAU		100%	22,145,105
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Kecamatan Kraton	25 Dokumen	Rp 10,000,000	DAU		25 Dokumen	11,000,000
									Belanja operasi : Rp 10,000,000				11,000,000
									Belanja pegawai : Rp -				-
									Belanja barang dan : Rp 10,000,000				11,000,000
									Belanja bunga : Rp -				-
									Belanja subsidi : Rp -				-
									Belanja hibah : Rp -				-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
								Belanja bantuan	: Rp	-			-
								Belanja modal	: Rp	-			-
								Belanja tidak terduga	: Rp	-			-
								Belanja transfer	: Rp	-			-
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kraton	25 Dokumen	Rp	10,000,000	DAU	25 Dokumen	11,000,000
								Belanja operasi	: Rp	10,000,000			11,000,000
								Belanja pegawai	: Rp	-			-
								Belanja barang dan jasa	: Rp	10,000,000			11,000,000
								Belanja bunga	: Rp	-			-
								Belanja subsidi	: Rp	-			-
								Belanja hibah	: Rp	-			-
								Belanja bantuan sosial	: Rp	-			-
								Belanja modal	: Rp	-			-
								Belanja tidak terduga	: Rp	-			-
								Belanja transfer	: Rp	-			-
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kraton	25 Dokumen	Rp	10,131,914	DAU	25 Dokumen	11,145,105
								Belanja operasi	: Rp	10,131,914			11,145,105
								Belanja pegawai	: Rp	-			-
								Belanja barang dan jasa	: Rp	10,131,914			11,145,105
								Belanja bunga	: Rp	-			-
								Belanja subsidi	: Rp	-			-
								Belanja hibah	: Rp	-			-
								Belanja bantuan sosial	: Rp	-			-
								Belanja modal	: Rp	-			-
								Belanja tidak terduga	: Rp	-			-
								Belanja transfer	: Rp	-			-
								Total Belanja operasi	: Rp	3,517,408,814			3,869,149,695
								Belanja pegawai	: Rp	2,357,298,000			2,593,027,800
								Belanja barang dan jasa	: Rp	1,160,110,814			1,276,121,895
								Belanja bunga	: Rp	-			-
								Belanja subsidi	: Rp	-			-
								Belanja hibah	: Rp	-			-
								Belanja bantuan sosial	: Rp	-			-
								Total Belanja modal	: Rp	-			-
								Total Belanja tidak terduga	: Rp	-			-
								Total Belanja transfer	: Rp	-			-
								<b>Total Belanja PD</b>	<b>: Rp</b>	<b>3,517,408,814</b>			<b>3,869,149,695</b>

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

1. Penyusunan Renja Tahunan SKPD Memperhatikan pada ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
2. Kode kegiatan program dan kegiatan pada Renja Tahunan SKPD Mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 55 Tahun 2007 tentang ; Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pagu indikatif untuk sementara menggunakan alokasi anggaran pada tahun 2016;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD Kecamatan Kraton;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan menampung usulan-usulan dari masing-masing seksi dan sub bagian;
6. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
7. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan adalah untuk melakukan penilaian terhadap kinerja aparat di Kecamatan Kraton dan jika perlu akan dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

#### 1.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2024 hal ini merupakan Dokumen Perencanaan strategis dimana akan menjadi acuan, dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya.

Dengan adanya dokumen RPJMD ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. RPJMD merupakan visi, misi dan program dari Kepala Daerah terpilih yang difinitif, rencana dan agenda-agenda Pembangunan periode lima tahun kedepan dalam rangka mengaktualisasikan perencanaan dalam RPJMD tersebut menjadi dokumen perencanaan Tahunan berupa penjabaran suatu rencana strategis ke dalam Rencana operasional yang untuk memelihara konsistensi antara

capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. dengan tujuan antara perencanaan dan penganggaran Tahunan maka SKPD akan menyusun Rencana Kerja Tahunan.

2. Seluruh satuan kerja pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkewajiban menyusun Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasuruan. Adapun untuk sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra SKPD yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran strategis Kabupaten sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD.
3. Rencana strategis SKPD merupakan pedoman, dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya akan berfungsi dalam penetapan Kinerja serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
4. Adapun sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten, SKPD sebagai Instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator Kinerja bagi kepentingan masing-masing SKPD berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.
5. SKPD merumuskan dan menetapkan Program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD hal ini berdasarkan kebutuhan masing-masing SKPD serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh SKPD untuk setiap tahunnya hal ini merupakan bentuk salah satu perwujudan dari pelaksanaan RPJMD yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan yang berkelanjutan.

### **1.3 Rencana Tindak Lanjut**

1. Dukungan dari semua pihak guna memberikan sumbangsih pemikiran, saran dan informasi agar di dalam pengambil kebijakan administrasi publik dan perjalanan terhadap masyarakat.
2. Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan SKPD, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian, pengawasan hal ini sebagai bahan acuan dalam perumusan rencana kerja tahunan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Meningkatkan peran serta kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik.

## BAB V

### PENUTUP

Pada dasarnya dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kraton adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi yang ada di RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2024 di Kecamatan Kraton.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kraton dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BUPATI PASURUAN.

ttd.

M. IRSYAD YUSUF